



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK ESELON III TAHUN 2018**

BAGIAN : HUKUM

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	TARGET TAHUN 2018				REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TARGET						
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A.</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>%</b>	<b>100</b>							
1.	Pembentukan unit bantuan hukum	Jumlah Perkara yang terselesaikan dalam 1 Tahun	Perkara	12	2	4	4	2	12		
		Jumlah Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin	Perkara	8	2	2	2	2	0	- Tidak ada klaim bantuan hukum kepada masyarakat miskin. - Pencabutan 7 perkara gugatan pasca pilkades e-Votting tidak sampai pada putusan.	
2.	Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Permasalahan Hukum yang terinventarisir dalam 1 tahun	Permasalahan	14	4	3	5	2	14		
		Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan dalam 1 tahun	Permasalahan	14	4	3	5	2	14		
		Jumlah Legal Opinion dalam 1 tahun	Legal Opinion	6	1	2	2	1	0	Legal opinion tidak ada	
<b>B.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Prosentase tertatanya peraturan perundang undangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>							
1.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Propemperda yang disusun dalam 1 tahun (1 Surat Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019)	Surat	1	-	-	-	1	1	1 Surat Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019	
2.	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di Eksekutif	Raperda	20	-	10	9	1		Pembahasan Raperda di DPRD hanya dua tahap, tahap tiga tidak ada.	
		Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 tahun	Perda	20	-	10	9	1			
		Jumlah Sosialisasi Raperda	Raperda	20	-	5	5	10			
3.	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun	Sosialisasi	28	14	-	14	-			

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	TARGET TAHUN 2018				REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TARGET						
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Buku Himpunan Produk Hukum Daerah yang dicetak	Buku	600	-	-	300	300	600		
		Jumlah Buku Produk Hukum Daerah yang dicetak	Buku	6.000	-	-	3.000	3.000	6.000		
		Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Buku	100	-	50	50	-	100		
5.	Penyuluhan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan di desa dalam 1 tahun	Penyuluhan	6	-	2	2	2	6		
		Jumlah Kelompok Peserta Lomba Permainan Beberan Ular Tangga	Kelompok	14	-	-	14	-	14		
6.	Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Bupati dalam 1 Tahun	Perbub	50	-	35	-	15	98		
		Jumlah Keputusan Bupati dalam 1 Tahun	Kep. Bupati	650	150	200	200	100	1.530		
		Jumlah Instruksi Bupati dalam 1 Tahun	Instr. Bupati	2	-	-	-	2	0		
		Jumlah Surat Edaran Bupati/Sekda dalam 1 Tahun	SE Bpt /Sekda	10	-	-	-	10	3		
		Jumlah Keputusan Sekda dalam 1 Tahun	Kep. Sekda	50	-	25	-	25	70		
7.	Fasilitasi KEluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum	Jumlah Peserta Lomba Kadarkum	Kelompok	14	-	-	14	-	14		
		Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibentuk/dibina	Kelompok	6	-	2	2	2	6		
		Jumlah Desa Sadar Hukum yang dibentuk	Desa	14	-	-	14	-	0		
8.	Fasilitasi Pemenuhan HAM	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Aksi HAM dan Kab./Kota Peduli HAM	Orang	75	-	75	-	-	75		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi HAM yang disusun	Laporan	4	1	1	1	1	4		
		Jumlah Laporan Data Peduli HAM yang di susun	Laporan	1	-	-	1	-	1		
9.	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi Produk Hukum Desa Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan Desa	Jumlah Rancangan Produk Hukum Desa yang di evaluasi	RPHD	600	50	50	250	250	0		
		Jumlah Produk Hukum Desa yang diklarifikasi	PHD	600	50	100	225	225	600		

Penyelenggaraan Temu Kader PKK dalam pemecahan rekor MURI simulasi penyuluhan hukum dengan metode permainan ular tangga tertunda mengingat adanya penyelenggaraan PilkaDes e-Votting secara serentak.